RENJA PERUBAHAN

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

KOMPLEK BBI SUKO MENANTI
PADANG TUJUH NAGARI AUA KUNIANG
KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR :
100.3.3.2/838/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah;

b. bahwa perkembangan keadaan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun anggaran 2022 yang harus dipergunakan untuk tahun anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365, Pasal 366 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan perangkat daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

KELIMA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
4. Bab IV Penutup;

KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
22. Sekretariat Daerah;
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Inspektorat;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Rumah Sakit Umum Daerah;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
33. Kecamatan.

KEDELAPAN :

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat
2. Lain-lain yang dirasa perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Renja perubahan Dinas Perikanan merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, melalui program Dinas Perikanan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan perikanan.

Rencana Kerja perubahan yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam mengoperasikan kegiatan setiap tahunnya dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda tahun 2024 yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Perikanana untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Perikanan.

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Simpang Empat, Oktober 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ZULFI AGUS, S.Pi
Pembina / IV.b
NIP. 19820831 200501 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan tahun berjalan (2023), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program.

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2031;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 838 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Perikanan sebagai akibat adanya beberapa perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga Dinas Perikanan perlu menyesuaikan proses perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan perubahan Recana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Program;
2. Menyesuaikan kerangka asumsi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan situasi terkini;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru,perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 meliputi :

a. Perubahan rancangan pendanaan Dinas Perikanan ;
b. Perubahan proyeksi keuangan Dinas Perikanan dan kerangka pendanaan yangterdiri atas :

1) Perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2023;
2) Perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2023;
3) Perubahan realisasi dan proyeksi/target Pembiyaan tahun 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen perubahan Recana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sesuai pedoman penyusunan Recana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

BAB II : **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RENJA Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

BAB III : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB IV : **PENUTUP**

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat perikanan tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2016. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Program dan Kegiatan di Kabupaten Psaman Barat untuk itu sekiranya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perikanan mendukung Program dan Kegiatan yang dialokasikan Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk kemajuan masyarakat perikanan Kabupaten Pasaman Barat. Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakann 5 (Lima) program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perikanan tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2023), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel T-C 29 berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29) Evaluasi Pelaksnan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1 (T-C.29) Evaluasi Pelaksnan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
															I		II		III		IV								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7÷10	15=14/6 x 100%		16	17
		9					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		25	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Total Persentase Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan	100%	21,747,892,637	98	8,077,404,983	60%	5,344,357,118	18%	789,527,690	50%	2,256,888,643					60	86	9,925,728,824	46		DISKAN	
		25	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13,654,106,424	100%	3,364,318,738	100%	3,285,696,091	40%	696,772,540	60%	1,638,401,793					60		4,890,362,529	36		DISKAN	
		25	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	143,373,525	100%	74,481,500	100%	8,752,150	33%	9,166,442	44%	16,512,742					44		84,135,990	59			
		25	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Perikanan yang disusun	42 dokumen	56,396,825	7 dokumen	31,275,000	7 dokumen	7,652,150	2 Dokumen	5,921,342	2 Dokumen	6,858,342					57	90	31,275,090	55		DISKAN	karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di
		25	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Dinas Perikanan yang disusun	12 dokumen	86,976,700	2 dokumen	43,206,500	2 dokumen	1,100,000	1 Dokumen	3,245,100	0 Dokumen	9,654,400					50	878	52,860,900	61		DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
		25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12,049,807,887	100%	2,809,678,193	100%	2,980,350,525	24%	559,401,003	48%	1,371,134,905					48		4,180,813,098			DISKAN	
		25	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yag mendapat gaji dan tunjangan	96 bln	11,348,207,887	24 Orang	2,427,228,193	14 orang/bulan	2,833,330,525	20 Orang	547,711,003	20 Orang	1,346,304,905					100	48	3,773,533,098	33		DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS PTT (2 orang)/THL (2 orang) penunjang administrasi perkantoran dan keuangan	78 bln	422,500,000	13 bln	287,350,000	1 Dokumen	84,500,000	-	-	-	-					-	-	287,350,000	68		DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keungan	12 laporan	279,100,000	12 bln	95,100,000	2 dokumen	62,520,000	1 dokumen	11,690,000	0 Dokumen	24,830,000					50	40	119,930,000	43		DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	110,800,000	-	-	383 Unit	27,700,000	-	-	-	-					-	-	-	-		DISKAN	

		25	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	4 Dokumen	88,400,000		-	-	2 Dokumen	22,100,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	12 Laporan	22,400,000		-	-	2 Laporan	5,600,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah**	**100%**	**93,000,000**		**-**	**-**	**100%**	**24,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**		**-**		**-**	**DISKAN**	
		25	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapat pakaian dinas beserta atributnya	100 orang	45,000,000		-	-	25 Paket	15,000,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	4 orang	14,000,000		-	-	5 Orang	2,000,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	2 orang	17,000,000		-	-	5 Orang	5,000,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	54 orang	17,000,000		-	-	13 Orang	2,000,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**576,310,682**	**100%**	**212,960,850**	**100%**	**132,747,206**	**32%**	**41,619,750**	**48%**	**59,225,050**				**48**			**272,185,900**			**DISKAN**	
		25	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan Instalasi listrik penunjang operasional kantor	6 Paket	40,602,782	1 paket	3,120,200	1 paket	10,000,000	0 Paket		0,5 paket	270,000				50	3		3,390,200		8	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	6 Paket	156,784,820	1 paket	55,073,200	1 paket	41,954,856	0,25 paket	9,009,000	0,25 paket	13,819,000				50	33		68,892,200		44	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	6 Paket	42,943,030	1 paket	7,460,000	-	-	-	-	-	-				-			7,460,000		17	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 Paket	43,603,000	2 Paket	12,585,750	1 Paket	10,000,000	0,5 paket	2,545,200	0,5 paket	3,532,200				100	35		16,117,950		37	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan

		25	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	204 Laporan	292,377,050	100 kali	134,721,700	100 Laporan	70,792,350	20 Laporan	30,065,550	20 Laporan	41,603,850					40	59		176,325,550		60	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**125,429,490**	**100%**	**41,231,500**	-	-	-	-	-	-					-	-		**41,231,500**			**DISKAN**	**Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023**
		25	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional dan administrasi perkantoran	4 Paket	125,429,490	1 Paket	41,231,500	-	-	-	-	-	-					-			41,231,500		33	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**404,404,840**	**100%**	**82,308,645**	**100%**	**101,101,210**	**32%**	**71,214,595**	**48%**	**157,381,296**					**48**			**134,190,191**			**DISKAN**	
		25	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	2 Laporan	88,400,000	-	-	1 Laporan	22,100,000	-	-	-	-					-	-		-		-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	6 Laporan	219,204,840	12 Bulan	82,308,645	1 Laporan	54,801,210	1 Laporan	31,214,595	0 Dokumen	51,881,546					100	95		134,190,191		61	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	capaian pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	6 Laporan	96,800,000	-	-	1 Laporan	24,200,000	1 Laporan	40,000,000	0 Dokumen	105,499,750					100	436		-		-	DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
		25	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**150,980,000**	**100%**	**143,658,050**	**100%**	**62,745,000**	**32%**	**15,370,750**	**48%**	**34,147,800**					**48**			**177,805,850**			**DISKAN**	**Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan**
		25	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR serta jumlah non pns yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan dinas	76 Unit	71,300,000	36 unit	93,358,050	36 unit	17,825,000	20 Unit	15,370,750	20 Unit	30,577,800					56	172		123,935,850		174	DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
		25	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik yang dipelihara	76 Unit	79,680,000	10 unit	50,300,000	36 unit	44,920,000	-	-	5 Unit	3,570,000					14	8		53,870,000		68		Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**659,383**	**4,721,508,315**	**1%**	**2,019,185,915**	**109431 Ton**	**1,160,174,826**	**27352.75**	**18,244,550**	**36470.33**	**29,032,050**					**58**			**2,048,217,965**			**DISKAN**	
		25	**03**	**2**	**02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terbantunya sarana penangkapan ikan**	**580 Unit**	**4,721,508,315**	**343 Unit**	**2,019,185,915**	**343 Unit**	**1,160,174,826**	**100 Unit**	**18,244,550**	**50 Unit**	**29,032,050**					**44**			**2,048,217,965**			**DISKAN**	
		25	03	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang dibantu untuk mengembangkan kelembagaan kelompok	115 KUB/KSU	4,249,276,484	1 Kelompok	2,019,185,915	19 KUB 190 Orang	1,044,157,343	5 KUB	18,244,550	5 KUB	29,032,050					53	3		2,048,217,965		48	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan

		25	03	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan KelembagaanNelayan Kecil	Jumlah kelompok yang terbina	59 Kali	472,231,831	-	-	19 Kelompok	116,017,483	-	-	-	-					-	-		-	-	DISKAN	Dilaksanakan di triwulan 3 atau 4
		25	**03**	**02**	**04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data base kapal ukuran < 10 GT**	**55 Kapal**	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		-	-	**DISKAN**	
		25	03	02	04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah data base kapal ukuran < 10 GT	55 Kapal	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		-	-	DISKAN	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	04				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	36,729	**2,316,911,204**	6.030 Ton	**2,119,052,800**	6.090 Ton	**544,742,146**	1522.5	**71,715,600**	2030	**581,053,950**					58			**2,405,689,950**		DISKAN	
		25	**04**	**02**	**04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah pembudidaya ikan yang dibantu**	**87 Pokdakan**	**2,316,911,204**	**6.030 Ton**	**2,119,052,800**	**6.090 Ton**	**544,742,146**	**1522.5**	**71,715,600**	**2030**	**581,053,950**					**58**			**2,405,689,950**		**DISKAN**	
		25	04	02	04	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pembudidaya ikan kecil	39 orang	500,000,000	-	-	14 Pokdakan	50,000,000	-	-	4 Pokdakan	294,416,800					29	589			-	DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
		25	04	02	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang terbantu	52 unit	400,000,000	12 Pokdakan	1,546,582,800	2 Unit	150,000,000	2 Unit	9,561,700	2 Unit	11,411,700					100	8	1,557,994,500		389	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	04	02	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang terbantu	10%	1,216,911,204	10 pokdakan	269,505,000	2 Unit	294,742,146	2 Unit	60,569,750	2 Unit	128,196,000					100	43	397,701,000		33	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	04	02	04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan hama dan penyakit ikan	53 Dokumen	200,000,000	20 pokdakan	302,965,000	5 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	1,584,150	1 dokumen	147,029,450					60	294	449,994,450		225	DISKAN	Belum terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran
Pasar		25	05				**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah POKMAWAS yang berbadan hukum	12 Pokmaswas	**226,199,200**	3 Pokmaswas	**11,323,774**	4 Pokmaswas	**150,000,000**	1 Pokmaswas	**2,795,000**	1 Pokmaswas	**6,610,850**					50			**17,934,624**		DISKAN	
		25	**05**	**02**	**01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Restocking bibit ikan garing untuk pokmaswas/lubuk larang**	**5,020**	**226,199,200**	**1.210 ekor**	**11,323,774**	**4 Pokmaswas**	**150,000,000**	**1 Pokmaswas**	**2,795,000**	**1 Pokmaswas**	**6,610,850**					**50**			**17,934,624**		**DISKAN**	
		25	05	02	01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terbantunya POKMASWAS bibit ikan	5,020	226,199,200	10.000 Ekor	11,323,774	3 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	2,795,000	1 Dokumen	6,610,850					67	4	17,934,624		8	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	06				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah peningkatan produksi ikan olahan	20 Jenis	**829,167,494**	3 Jenis	**563,523,756**	3 Jenis	**203,744,055**	-	-	1 Jenis	**1,790,000**					33			563,523,756			DISKAN	
		25	**06**	**02**	**01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Penerbitan tanda daftar perikanan**	**72**	**165,833,499**	-	-	**1 Dokumen**	**40,748,810**	-	-	**0 Dokumen**	**1,790,000**					-					**DISKAN**	

		25	06	02	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan tanda daftar perikanan	6	165,833,499	-	-	1 dokumen	40,748,810	-	-	0 Dokumen	1,790,000					-	4			-	DISKAN	Karena keterbatasan anggaran, maka pada kegiatan ini anggaran di kurangkan
		25	**06**	**02**	**02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Sertifikat Kelayakan Pengolahan**	**12 kali**	**248,750,248**	-	-	**1 Kali**	**61,123,217**	-	-	-	-					-			-		**DISKAN**	
		25	06	02	02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba masak tingkat propinsi	12 kali	248,750,248	-	-	1 Unit Usaha	61,123,217	-	-	-	-					-	-		-		-	Karena adanya keterbatasan anggaran maka kegiatan ini belum dapat di anggarkan pada tahun 2023
		25	**06**	**02**	**03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bahan baku yg tersalurkan**	**24 Poklahsar**	**414,583,747**	**4 Poklahsar**	**563,523,756**	**4 Poklahsar**	**101,872,028**	-	-	-	-					-			**563,523,756**			
		25	06	02	01	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan yang tersalurkan	24 Poklahsar	414,583,747	4 Poklahsar	563,523,756	4 Poklahsar	101,872,028	-	-	-	-					-	-		563,523,756		136		Dilaksanakan di triwulan 3 atau 4

BAB III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 5 (lima) program yang akan didukung oleh 14 (Empat belas) kegiatan, dan 30 (Tiga puluh) Sub Kegiatan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C. 33 berikut ini **:**

Tabel. 3.1 T-C33 rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											5,657,158,461	5,657,158,461					5,421,714,913
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,997,893,652	2,997,893,652					3,320,570,051
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											63,729,200	63,729,200					5,418,683
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	22,500,000	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,208,683
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	9 Dokumen	9 Dokumen	41,229,200	41,229,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,210,000
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,366,901,652	2,366,901,652					2,985,492,388
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100 %	100 %	2,307,941,652	2,307,941,652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,838,472,388
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	84,500,000
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, PTT dan THL	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	58,960,000	58,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	62,520,000

3	**25**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**				**27,700,000**
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannya pengadministrasian barang milik daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	0 2 orang	0		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,100,000
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksannya pengadministrasian barang milik daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	2 orang	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,600,000
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**				**30,000,000**
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Paket	0 Paket	100 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas, Bimtek dan Diklat bagi ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Orang	0 Orang	100 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2023: Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 01 2.06	**nistrasi Umum Perangkat Daerah**											**134,043,300**	**134,043,300**					**133,312,770**
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Perkantoran, tersedianya administrasi perkantoran dan terlaksananya rapat koordinasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,715,000	4,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,000,000
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Perkantoran, tersedianya administrasi perkantoran dan terlaksananya rapat koordinasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	31,064,000	31,064,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40,020,420
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Perkantoran, tersedianya administrasi perkantoran dan terlaksananya rapat koordinasi	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	7,600,300	7,600,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,500,000
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya sarana dan prasarana Perkantoran, tersedianya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	100 Laporan	100 Laporan	100 %	100 %	90,664,000	90,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	70,792,350
				administrasi perkantoran dan terlaksananya rapat koordinasi	Kelurahan											daerah		
3 25 01 2.08	**edian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**344,799,500**	**344,799,500**					**100,901,210**
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,100,000
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	86,700,000	86,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	54,801,210
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	258,099,500	258,099,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja (Rencana Tahun 2023): Program Sebelum	Program Sesudah	Keluaran Sub Kegiatan Sebelum	Keluaran Sub Kegiatan Sesudah	Hasil Kegiatan Sebelum	Hasil Kegiatan Sesudah	Pagu Indikatif (Rp.) Sebelum	Pagu Indikatif (Rp.) Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024: Target Capaian Kinerja: Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 04 2.04	**elolaan Pembudidayaan Ikan**											**1,178,119,709**	**1,178,119,709**					**454,765,401**
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibantu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13 Pokdakan	660,547,709	660,547,709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	100,000,000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibantu	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13 Pokdakan	338,364,000	338,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	304,765,401
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibantu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6090 Ton	6090 Ton	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Unit	13 Pokdakan	179,208,000	179,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produksi perikanan budidaya	6090 Ton	50,000,000
3 25 05 PROG	**RAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**100,500,000**	**100,500,000**					**150,000,000**
3 25 05 2.01	**awasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**											**100,500,000**	**100,500,000**					**150,000,000**
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	3 Dokumen	3 Dokumen	1210 ekor	100 Persen	100,500,000	100,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	4 Pokmaswas	150,000,000
3 25 06 PROG	**RAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**256,151,000**	**256,151,000**					**207,492,846**
3 25 06 2.01	**bitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**											**133,151,000**	**133,151,000**					**41,498,589**
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Jumlah dokumen data Poklahsar	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan PengolahanTersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	3 Jenis	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	133,151,000	133,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	3 Jenis	41,498,589
3 25 06 2.02	**insan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**0**	**0**					**62,247,884**
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Dokumen Data Poklahsar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	3 Jenis	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	3 Jenis	62,247,884
3 25 06 2.03	**edaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**123,000,000**	**123,000,000**					**103,746,473**
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Terlaksannya penyedian dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan serta fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	3 Jenis	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Poklahsar	4 Poklahsar	123,000,000	123,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	3 Jenis	103,746,473
											TOTAL	**5,657,158,461**	**5,657,158,461**					**5,421,714,913**

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Oktober 2023
Kepala Dinas Perikanan
Pasaman Barat

Zulfi Agus, S.Pi
NIP. 19820831 200501 1 006

Lampiran

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR:100.3.3.2/279/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah [illegible] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna

5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/ 279 /BUP.PASBAR/2023
Tanggal : 30 maret 2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Zulfi Agus, S.Pi	Kepala Dinas	Ketua
Mustafa Kamal, MA	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Syafrizal. S, S.Pi	Kabid Perikanan Tangkap	Anggota
Khairil Huda, SH	Kabid Perikanan Budidaya	Anggota
Sutri Dahlena,SKM	Kabid Program	Anggota
Afian Abdillah, ST	Analis Akuakultur	Anggota
Mesra Welly Ika Putry, s.Pi	Analis Akuakultur	Anggota
Minda Elmayani, S.Pi	Pengelola Kesehatan Ikan	Anggota
Lisma Erni, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota
Adya Medilka, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Anggota
Rezi Wismora, S.TP, MM	Analis Kebijakan	Anggota
Nurhidayati, S.Pi	Ka.UPT BBI	Anggota
Erlina Topianti, SE	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Sekretariat

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI